



**Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama
Pertambangan Kongo dan Tiongkok**

Denta Utama, Mohamad Rosyidin, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Democratic Republic of the Congo is a country with abundant cobalt resources, but this does not then provide economic stability to the Congo. China uses this through its transnational company Huayou Cobalt to secure the cobalt supply in the Congo by creating a cooperation project between the two by bartering mining rights and investing funds for infrastructure development. It is feared that this will lead to Congo's dependence on China's financial capacity to advance their country. This research uses neo-marxism theory with further research using dependency theory by Gunder Frank. The author collects data using the literature study method through journals/articles, books, websites, and international news. This research is explanatory, which will provide an overview of why the Congo cannot get out of adversity and dependence on direct investment provided by China by exchanging mining rights with China. The result of this study is that Congo is trapped in a cycle of dependence due to the unequal international structure and the Congo's inability to deal with its domestic problems.

Keywords: Huayou Cobalt, Democratic Republic of Congo, investment, exploitation, dependence.

PENDAHULUAN

Tiongkok telah melakukan beberapa kerjasama dengan negara- negara Afrika, seperti Zambia dengan pertambangan tembaga, Angola menjadi tempat penyulingan minyak dan Gabon merupakan sumber penghasil bijih besi. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara- negara Afrika ini menarik perhatian Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan negara-

negara Afrika. Kebutuhan akan baterai lithium ion sebagai sumber daya perangkat telepon dan kendaraan listrik menjadi meningkat, sehingga berdampak pada kebutuhan akan kobalt yang semakin tinggi pula. Kobalt sendiri merupakan bahan baku utama pembuatan baterai pada perangkat telepon maupun kendaraan listrik. Menyebabkan kobalt menjadi komoditi panas yang bernilai tinggi, hal ini menarik perhatian negara- negara produsen untuk melakukan investasi terhadap negara penghasil kobalt. Salah satu negara dengan penghasil kobalt di Afrika yaitu negara Republik Demokratik Kongo (Ross, 2017).

Tiongkok menjadi negara yang tertarik dengan Kongo karena sumber daya alam yang dimilikinya. Terlebih Kongo belum memaksimalkan potensinya dengan baik. Maka dibutuhkan bantuan luar agar komoditi yang mereka miliki menjadi optimal. Hal inilah yang di upayakan oleh Tiongkok dalam menjalin hubungan dengan Kongo. Sumber daya mineral menjadi daya tarik Tiongkok demi memenuhi kepentingan negara mereka terkait kemajuan manufaktur, mereka membutuhkan kobalt sebagai bentuk efisiensi Tiongkok dalam memposisikan diri menjadi yang terdepan dalam hal manufaktur dan berusaha bersaing dengan bangsa barat yang lebih dulu terjun ke dunia manufaktur. Maka dari itu, dibutuhkan kesepakatan antara Tiongkok dengan Kongo untuk meraih tujuan tersebut (Jiang, 2010).

Tiongkok melakukan kesepakatan dengan Kongo dimana Tiongkok akan memberikan investasi kepada Kongo dalam hal memajukan infrastruktur, sedangkan Tiongkok meminta hak eksplorasi sumber daya mineral di Kongo sebagai imbalan untuk pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud merupakan tempat- tempat seperti sekolah, rumah sakit, jalan dan juga pertambangan. Dengan terjalinnya kerjasama diantara keduanya, Kongo bersedia untuk memberikan hak eksplorasi pertambangan yang ada di Kongo sebagai gantinya Kongo akan mendapatkan bantuan dana dalam meningkatkan infrastruktur melalui pinjaman (Iloydsbanktrade, 2022). Pertambangan di Kongo masih tergolong tradisional dengan masih banyaknya pertambangan pribadi atau biasa disebut dengan *artisanal mining* dan otoritas pertambangan domestik masih banyak terdapat pelanggaran terhadap para pekerjanya seperti hak pekerja tidak di lakukan dengan semestinya dan masih maraknya pekerja anak yang diperkerjakan disana.

Sebagai timbal balik atas kerjasama yang terjalin antara Tiongkok dengan Kongo, Tiongkok menghadirkan perusahaan transnasional yang berfokus pada pertambangan yaitu Huayou Cobalt. Kedatangan perusahaan tambang asal Tiongkok di Kongo ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan berusaha untuk menyalurkan pengetahuan kepada para penambang

rakyat demi menciptakan penambang yang professional. Selain itu mereka juga berusaha untuk meminimalisir bahaya dalam kegiatan pertambangan. Tiongkok berjanji akan meningkatkan infrastruktur pertambangan yang ada di Kongo melalui perusahaan- perusahaan tambang yang mereka miliki baik swasta maupun milik pemerintah. Karena pada dasarnya perusahaan- perusahaan tersebut juga didanai oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan mereka dalam mengamankan Kongo (Uren, 2021).

Huayou Cobalt memiliki peran penting dalam menjaga hubungan Tiongkok dengan Kongo. Selain sebagai perpanjangan tangan Tiongkok, Huayou Cobalt juga memiliki pengaruh besar di pertambangan Kongo. Dimana mereka memiliki beberapa kebijakan yang berupaya untuk melindungi aliran pasokan kobalt dan pertambangan rakyat. Beberapa diantaranya adalah dengan menutup area tambang ilegal yang ada di atas pemukiman pribadi dan menciptakan koperasi untuk para penambang rakyat agar dapat menyalurkan hasil tambang mereka ke perusahaan tersebut. Kehadiran Huayou Cobalt asal Tiongkok di industri pertambangan Kongo merupakan jembatan bagi kedua negara untuk saling memperkuat hubungan bilateral diantara keduanya, namun adanya perusahaan transnasional tersebut memperlancar infrastruktur tambang di Kongo atau malah menghambat perkembangan dan stabilitas Kongo (Nyabiage, 2021).

Penelitian terkait kerjasama antara Tiongkok dan Kongo pada sektor tambang telah banyak dianalisis dari sisi hak asasi pekerja dan kebijakan-kebijakannya. Penelitian dari Beal (2014), menjelaskan bahwa adanya sifat eksploitatif antara Tiongkok dan Kongo tidak terlepas dari konsekuensi sejarah kolonial mereka yang eksploitatif yang berdampak pada kebijakan pemerintah saat ini. Penelitian dari Harahap (2017), menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap pekerja khususnya di Republik Demokratik Kongo tidak mempedulikan batasan usia termasuk di tambang kobalt. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum dan hak para pekerja anak agar dapat terhindar dari eksploitasi. Nabila (2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi pekerja di Republik Demokratik Kongo bertentangan dengan hukum internasional tentang pekerja dewasa dan pekerja anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode ini sangat cocok disajikan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan fenomena dengan fakta yang terjadi dan mengkaitkannya ke dalam teori yang ada. Maka dari itu, penelitian ini ingin memahami keterlibatan Huayou Cobalt dalam hubungan

kerjasama Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo (Sugiyono, 2014: 9). Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2). Dalam penelitian yang termasuk kedalam data kualitatif, meliputi kondisi Negara Republik Demokratik Kongo, Perusahaan transnasional Huayou Cobalt dan tata kelola perusahaan di Tiongkok. Sumber data dalam penelitian kualitatif yang dihasilkan dari sumber data sekunder berupa jurnal, buku, website, dan artikel (Moleong, 2013: 157).

PEMBAHASAN

Kesepakatan investasi Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo merupakan bentuk dari usaha Kongo dalam mengembangkan infrastruktur mereka akibat dari perang domestik yang berkepanjangan dan berdampak pada kondisi negara Kongo itu sendiri, dengan kekayaan alam yang mereka miliki, Kongo bersedia memberikan hak kelola mineral kepada Tiongkok demi mendapatkan investasi proyek infrastruktur senilai \$3 milyar (Sampson, 2021). Hubungan yang terjalin tersebut pada dasarnya menciptakan hubungan ketergantungan antara negara pendonor dengan negara berkembang. Dibuktikan dengan Kongo yang bergantung pada kekuatan investasi yang diberikan oleh Tiongkok dengan menerima segala bentuk konsekuensi yang akan diberikan Tiongkok kepada Kongo seperti memberikan bunga terhadap pinjaman tersebut. Dalam perspektif *neo-marxism* pemberian suku bunga tidak lain adalah bentuk dari kekuatan Tiongkok terhadap negara dunia ketiga, dengan adanya suku bunga tersebut kaum kapitalis yang ada di balik kebijakan tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal (Dugis, 2016).

Meskipun Tiongkok sekarang ini tidak termasuk ke salah satu negara utara, namun terdapat karakteristik seperti pengetahuan akan teknologi, dan kucuran dana melimpah dari Tiongkok yang hampir sama dengan negara-negara utara. Kementerian perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, Tiongkok menempati urutan pertama dalam melakukan investasi asing ke negara-negara di seluruh dunia dengan total nilai investasi senilai \$153.71 milyar (Wang, 2021). Oleh karena itu, dengan melihat kemampuan Tiongkok tersebut dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara melalui bantuan investasi berupa pinjaman dana infrastruktur. Tiongkok dan Kongo pada dasarnya memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada kolonialisme masa kekuasaan Belgia yaitu pemerintahan Raja Leopold II pekerja asal Tiongkok sudah ada di wilayah Kongo untuk membantu membangun infrastruktur di Kongo. Pada tahun 1965, Partai Komunis Tiongkok mengatakan kepada rakyat

Kongo: “Mereka tidak sendirian melawan kapitalisme. Semua warga Tiongkok bersamamu dalam menentang penjajahan” (Anshan, 2007).

Tidak dapat dipungkiri hubungan yang sudah terjalin sejak masa kolonial tersebut mempermudah akses Tiongkok dalam melakukan investasi di Afrika, khususnya di negara-negara yang kaya sumber daya dan miskin peraturan seperti Republik Demokratik Kongo (Hon. et. al, 2010). Selain itu, Tiongkok juga merupakan pendukung setia gerakan pembebasan Afrika. Tiongkok menggunakan program radio, propaganda, buku, dan memasok senjata untuk mempromosikan dan mendukung pemberontakan Afrika melawan kolonialisme (Gruben, 1962). Tiongkok memberikan pelatihan intensif sabotase, perang gerilya dan subversi politik kepada pemuda Afrika yang melawan pemerintahan kolonial. Di Kongo, Tiongkok mendukung “Pemberontakan Simba” Juli 1963 yang dipimpin oleh “Pierre Mulele.”. Tiongkok juga mendukung Laurent Kabila ketika ia menciptakan gerakan pemberontakan dengan menciptakan Partai Revolusi Rakyat (PRP) pada tahun 1967. Tiongkok juga memberikan dukungan sosial kepada pemerintahan Presiden Mobutu.

Antara 1970-1990 Tiongkok mendukung pemerintah Kongo dengan investasi kecil yang terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesehatan, dan layanan sosial. Di bidang pendidikan, Tiongkok menyediakan buku sekolah. Selama periode ini Tiongkok juga memberikan bantuan keuangan sebesar \$3 juta. Tiongkok juga berinvestasi di bidang pertanian yang berfokus pada beras di wilayah Bumba di Provinsi Equateur. Dari segi infrastruktur, Tiongkok membangun bangunan simbolis seperti gedung parlemen dan stadion sepak bola nasional. Hubungan tersebut melambat pada awal 1990-an karena meningkatnya ketidakstabilan politik dan penurunan Negara Kongo (Clark et al, 2008). Keadaan tersebut menggambarkan peran Tiongkok yang sangat masif pada masa perkembangan Kongo, hal ini jugalah yang mendasari Kongo terus bergantung terhadap Tiongkok hingga kini. Dalam pandangan *neo-marxism*, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari hubungan sosial, ekonomi dan politik antara Tiongkok dan Kongo (Richer, 2008).

Neo-marxism menekankan pada imperialisme yang dilakukan kapitalis di dunia ketiga yang di representasikan oleh Tiongkok terhadap Kongo (Dugis, 2016). Kerjasama tersebut akan menimbulkan sifat ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok, dengan adanya bantuan pinjaman dan investasi yang mudah didapat namun dengan berbagai syarat sehingga dalam kondisi tersebut, Kongo sebagai representatif negara selatan akan bergantung pada segala bentuk bantuan yang ditawarkan oleh Tiongkok dengan harapan dapat membangun

infrastruktur mereka demi meningkatkan perekonomian Kongo. Hal ini berujung pada sulitnya Kongo dalam melunasi pinjaman mereka kepada Tiongkok dan malah membuat negara-negara selatan atau negara dunia ketiga ini akan tetap berada diposisi mereka sebagai negara terbelakang (Anderson, 2018).

Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bangkit sendiri, Kongo bersedia memberikan Tiongkok segala keuntungan dari investasi infrastruktur mereka. Selain mineral, terdapat hasil alam lainnya berupa kayu yang dimiliki Kongo dari hutan yang mereka miliki. Kongo juga memiliki tanah subur yang luas, hal ini menjadi menarik bagi Tiongkok karena dianggap dapat mengatasi kerawanan pangan yang mungkin terjadi di Tiongkok (Kane & Serewicz, 2001). Selain itu, 2.800 juta hektar lahan di Kongo digunakan Tiongkok untuk menanam sawit.

Ketergantungan lain tercermin pada masa pemilihan Presiden, dimana pemerintahan Kongo berusaha mendekati Tiongkok demi mendapatkan bantuan dan dukungan pada saat krisis pemerintahan. Pemerintahan Kongo membutuhkan bukti nyata sebagai upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap janji kampanye selama pemilihan berlangsung. Melalui menteri Kongo sebagai penanggung jawab pada saat itu yaitu Athanase Matenda, berpendapat bahwa negara membutuhkan pendanaan eksternal dan bersedia menerima berapapun tingkat bunga selama ada pinjaman yang tersedia (Budimbwa, 2008). Dana tersebut dibutuhkan demi membantu Kabila terpilih kembali sebagai Presiden Kongo. Tiongkok melihat peluang tersebut dan bersedia memberikan investasi dana kepada Kongo sebagai upaya Tiongkok dalam mengamankan sumber daya yang dimiliki oleh Kongo.

Investasi tersebut sekilas memberikan harapan bagi Kongo, namun kerjasama tersebut justru menciptakan lingkaran ketergantungan, dan sistem tersebut tentu saja akan tetap dipertahankan mengingat keuntungan akan didapatkan oleh kaum tertentu yaitu para kaum kapitalis. Dengan struktur internasional yang hierarkis dan tidak adil ini, Tiongkok perlahan-lahan akan mengeruk semua kekayaan yang ada di Kongo tanpa harus memberikan timbal balik yang serupa. Selain itu, kolonialisme yang pernah terjadi di Kongo juga berdampak pada posisi Kongo sebagai negara dunia ketiga, dimana kolonialisme itu sendiri menyebabkan adanya perbedaan status atau *power asymmetric* dan berdampak pada perekonomian negara berkembang karena adanya integrasi secara paksa dalam sistem ekonomi internasional. Hal tersebut menempatkan negara dunia ketiga sebagai produsen bahan mentah dan tempat tenaga kerja murah. Hal ini menjadi alasan Tiongkok menginvestasikan dana mereka ke Kongo, selain

adanya sumber daya mineral dan tenaga kerja yang murah. Maka Kongo tidak akan bisa lepas dari lingkaran kemiskinan karena adanya integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok ke negara berkembang sehingga mereka menjadi sulit untuk bersaing dan mandiri dalam memasarkan hasil alam mereka (Dougherty & Pfaltzgraff, 1990).

Sumber daya mineral menjadi tonggak ekonomi Republik Demokratik Kongo, setidaknya terdapat lebih dari setengah cadangan mineral kobalt dunia berada di Kongo. Meski begitu, Kongo tidak mampu mengoptimalkan kekayaan mereka dan tidak memberikan dampak yang berarti kepada kondisi ekonomi masyarakat Kongo. Dengan kondisi tersebut, Kongo berusaha untuk meningkatkan infrastruktur mereka melalui investasi asing, melihat peluang tersebut Tiongkok dengan segala latar belakangnya di wilayah Afrika berusaha membantu Kongo dalam meningkatkan infrastruktur Kongo. Demi mencapai hal tersebut, Kongo dan Tiongkok melakukan perjanjian barter mineral untuk infrastruktur yang terjadi pada tahun 2007 dengan nama Perjanjian Sicominex.

Dari perjanjian tersebut, Tiongkok menginginkan akses hak pertambangan, sebagai gantinya Tiongkok akan membangun infrastruktur transportasi dan sosial di Kongo, yang dibiayai oleh pinjaman dari Bank Ekspor Impor (Exim) Tiongkok milik negara. Pinjaman tersebut harus diganti melalui keuntungan dari usaha pertambangan. Dan salah satunya adalah Huayou Cobalt yang berkantor pusat di Tiongkok. Huayou Cobalt mendirikan anak perusahaan di Kongo dengan nama Congo Dongfang Mining (CDM) dengan tujuan selain mendapatkan hak eksplorasi alam juga menjadi sarana pertukaran ilmu antara Tiongkok dengan negara berkembang. Investasi ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan Tiongkok yang berfokus pada ekonomi dan strategis.

Kebijakan ini menjadi alat bagi kaum kapitalis dalam upaya untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan mengamankan lokasi strategis sumber daya mineral dengan memberikan timbal balik yang menguntungkan kepada Kongo. Namun pada realitanya, kehadiran Tiongkok di Kongo tidak memberikan keuntungan tambang bagi Kongo melainkan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun oleh Tiongkok (Kafarhire, 2019). Selain itu perusahaan Huayou Cobalt menginvestasikan \$147,2 juta dalam proyek pertambangan di Republik Demokratik Kongo (Yelin, 2018). Kucuran dana ini nantinya digunakan untuk mengembangkan proyek pertambangan dan akan memperkuat posisi perusahaan pertambangan Tiongkok tersebut di Kongo. Peningkatan modal untuk mendanai proyek kobalt juga dilakukan oleh Huayou Cobalt sebagai bentuk peningkatan

hasil tambang yang diperkirakan akan mencapai 4.000 ton dalam waktu setahun. Komoditas ini akan dikirimkan ke Tiongkok untuk kebutuhan pasar lokal di Tiongkok dan distribusi ke berbagai perusahaan yang membutuhkan (Yi, 2018).

Negosiasi antara Kongo dengan Tiongkok terjadi melalui proyek Sicominex. Dalam proyek tersebut di sepakati pertukaran diantara keduanya, Tiongkok mendapatkan akses tambang dan Kongo memperoleh pinjaman dana untuk memajukan infrastruktur mereka. Proyek Sicominex ini merupakan ekspresi dari ambisi global dan upaya pemerintah Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam merebut pangsa pasar terutama dalam hal energi (Barboza, 2005). Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 17 September 2007. Dalam kesepakatan tersebut disusun atas dasar prinsip barter, dan hak tambang dibagi menjadi 32% milik Kongo dan 68% milik konsorsium perusahaan Tiongkok. Proyek infrastruktur yang dijanjikan Tiongkok akan didanai oleh Tiongkok Exim Bank dan merujuk kepada infrastruktur yang bersifat barang publik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah.

Penggantian pinjaman dana tersebut akan diganti melalui keuntungan dari operasi penambangan Sicominex. MoU dilakukan secara bertahap, pada September 2007 merupakan awal dari peletakan dasar untuk perjanjian utama Sicominex. Lalu pada April 2008 terjadi negosiasi ulang dengan fokus utama yaitu menaikkan jumlah konsesi pertambangan yang tadinya 200.000ton kobalt pada awal perjanjian, menjadi 600.000 ton kobalt. Lalu yang terakhir terjadi pembaharuan kontrak pada tahun 2009 dimana Tiongkok memasukkan perusahaan Joint Venture atau perusahaan gabungan mereka. Pada kontrak terbaru inilah, Huayou Cobalt mendapatkan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang memiliki saham pada proyek Sicominex. Huayou Cobalt dipercaya akan keahliannya dalam hal pertambangan, hal ini menjadi dasar utama konsorsium perusahaan Tiongkok memasukkan perusahaan tersebut kedalam proyek Sicominex tersebut (Jansson, 2011).

Melalui konsorsium perusahaan Tiongkok, Huayou Cobalt mendapatkan beberapa keuntungan. Kebijakan-kebijakan mengenai proyek Sicominex ini mayoritas menguntungkan pihak Tiongkok. Hasil pertambangan mengacu pada MoU tahun 2008 dan kontrak ketiga dari proyek Sicominex. Hal ini membebaskan perusahaan Tiongkok dari kewajiban pajak, Kongo tentu saja sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut, namun kesepakatan telah terjalin. Kongo seakan tunduk kepada konsorsium perusahaan Tiongkok dengan mengharuskan mengesahkan undang-undang parlementer yang mengakui rezim pajak khusus yang merupakan bagian dari

proyek barter Sicominex. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya power yang dimiliki oleh pemerintah Kongo dihadapan konsorsium perusahaan Tiongkok, tidak terkecuali Huayou Cobalt sebagai salah satu pemilik saham dari proyek Sicominex tersebut (Marysse & Geenen, 2011).

Menurut Viotti dan Kauppi (2012), hadirnya perusahaan transnasional disuatu negara berkembang dapat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah kebijakan ekonomi domestik negara pemilik modal serta merupakan tonggak dalam melanggengkan hubungan ketergantungan. Congo Dongfang Mining yang merupakan anak perusahaan dari Huayou Cobalt yang bermarkas di Tiongkok, tidak lain merupakan kepanjangan tangan dari Tiongkok dalam rangka mengamankan posisi mereka dalam menyimpang sumber cadangan mineral kobalt yang dimiliki oleh Kongo. Selain tujuan tersebut, hadirnya perusahaan transnasional tersebut menjadi bukti keseriusan Tiongkok dalam menanggapi pertumbuhan sektor tambang Kongo, yang telah menjadi tujuan Kongo dalam menyepakati kerjasama antara kedua negara tersebut. Diharapkan dengan adanya perusahaan tersebut, dapat terjadi transfer pengetahuan, kinerja, dan teknologi, terutama dari negara industri ke negara sedang berkembang.

Kongo telah mengupayakan mandiri dalam mengembangkan infrastruktur mereka, namun kurangnya infrastruktur itulah yang menyebabkan pembangunan ekonomi di Kongo terhambat, melihat dampak dari perang domestik dan kondisi politik yang tidak stabil. Maka membutuhkan kucuran dana asing agar dapat menjalankan fokus mereka dalam meningkatkan infrastruktur (Landry, 2018). Tiongkok bukanlah aktor asing bagi Kongo karna mereka telah menjalin hubungan lama, hal ini berdampak pada Tiongkok sebagai aktor utama dalam proses rekonstruksi negara. Kondisi tersebut menciptakan iklim ketergantungan terhadap kemampuan Tiongkok.

Kongo pada dasarnya telah membuka keran investasi mereka melalui Foreign Direct Investment (FDI), hal ini dapat membantu meningkatkan potensi pertambangan negara terkhususnya pada kobalt. Sektor pertambangan inilah yang menjadi daya tarik dari Kongo untuk menarik investor asing. Melihat kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung baik maka dibutuhkan kucuran dana dari luar agar pembangunan dapat berjalan di Kongo. Pada sektor pertambangan tersebut, Tiongkok menjadi investor utama sejak tahun 2000an, hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur Kongo bergantung pada kucuran dana dari Tiongkok (Njumboket & Nkanda, 2019).

Melalui kebijakan ini pulalah yang menyebabkan Kongo bergantung pada investasi asing, terlebih Kongo mengalami ketidakstabilan politik dimana korupsi merajalela dan konflik domestik yang hingga kini sulit untuk di selesaikan. Maka solusi terbaik pemerintah Kongo yaitu dengan membuka keran investasi asing langsung dengan Tiongkok sebagai investor utama mereka. Dengan kondisi tersebut, Tiongkok mendapatkan hak untuk mengakses penuh sumber daya mineral yang ada di Kongo dan hal inilah yang menjadi asal mula sifat eksploitatif terhadap negara penyedia bahan mentah atau negara-negara berkembang. Kondisi tersebut juga menyebabkan keterbelakangan terhadap Kongo dimana terjadi hubungan asimetris antara Tiongkok dengan negara berkembang, maka dari itu akan muncul ketergantungan akibat dari ketidakmampuan Kongo sebagai negara berkembang dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam mereka. Dengan begini, Tiongkok hanya akan menikmati dan memupuk kekayaan mereka (O'Brien, 2012).

Menurut Marysse dan Geenen, adanya perjanjian ini sifatnya akan merugikan Kongo karena Kongo berhutang melalui beberapa jaminan seperti suku bunga yang dapat merugikan Kongo itu sendiri. Bukannya saling menguntungkan namun Kongo malah menderita akibat dari adanya perjanjian tersebut. Kembali lagi ke masalah utama, tanpa adanya bantuan investasi Tiongkok tentu saja Kongo akan kesulitan mengembangkan infrastruktur mereka. Keadaan timpang ini akan terus dipertahankan oleh Tiongkok, karena Tiongkok sadar akan ketergantungan Kongo terhadap bantuan tersebut. Maka dengan memberikan suku bunga dan syarat-syarat yang memberatkan Kongo adalah salah satu cara Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan memanfaatkan ketimpangan tersebut (Teasdale, 2012). Huayou Cobalt menjadi aktor utama Tiongkok dalam pasokan kobalt mereka ke seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut mampu menyediakan produk dari hulu hingga ke hilir demi mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini tentu saja dilakukan demi kepentingan kaum tertentu, yaitu kaum kapitalis. Selain itu, distribusi kobalt yang dilakukan Tiongkok telah dilakukan secara masif ke berbagai negara.

Dengan berdirinya perusahaan transnasional Tiongkok di Kongo tersebut merupakan persetujuan pemerintah Kongo untuk memberikan hak eksploitasi mineral di beberapa wilayah yang ada di Kongo. Selain itu, Tiongkok juga sepakat akan membangun infrastruktur di Kongo dan pengembalian pinjaman akan diganti melalui hasil dari pertambangan tersebut. Namun kerjasama ini belum dapat memenuhi harapan dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat Kongo. Dengan adanya kerjasama tersebut tidak banyak lapangan pekerjaan

tercipta dan malah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar tambang dengan menghancurkan tanah di sekitar wilayah tersebut (Global Times, 2021).

Kongo sendiri merupakan negara yang rentan akan tindakan- tindakan korupsi, dikarenakan negaranya sedang menghadapi krisis ekonomi serta adanya politik yang tidak stabil. Kurang lebih Kongo telah menghadapi 50 tahun dalam perjuangannya terhadap perang domestik, krisis kesehatan, dan stagnasi ekonomi. Kondisi ini bermula ketika perusahaan pendonor utama keuangan Kongo mengalami keruntuhan yang terjadi pada tahun 1990-an. Perusahaan milik negara ini bernama Générale des Carrières et des Mines S.A. (Gécamines) (Amnesty Intenational, 2016). Perusahaan milik negara ini merupakan yang terbesar di Kongo dan telah didirikan sejak tahun 1906, dan setidaknya telah memperkerjakan sebanyak 34.000 pekerja dan menghasilkan sekitar 500.000 ton mineral tiap tahun. Sebagai kontributor utama ekonomi Kongo pada tahun 1970 hingga 1980, Gécamines telah menjadi perusahaan yang dapat menjalankan banyak kegiatan seperti pertanian, infrastruktur (rumah sakit dan sekolah) demi kepentingan negara. Dengan runtuhnya perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar gaji dan juga berdampak pada ekonomi Kongo sehingga kondisi Kongo menjadi tidak stabil (Gov, 2014).

Maka investasi yang Tiongkok menjadi jalur alternatif bagi Kongo untuk mengembalikan kembali kondisi ekonomi negara tersebut. Perjanjian ini dinilai baik bagi Kongo, dan pemerintah Tiongkok berjanji untuk melaksanakan perjanjian setara antara hak eksplorasi mineral dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Tiongkok demi memperoleh akses energi sumber daya, memperluas infrastruktur dan mendapatkan dukungan politik (Kabemba, 2016). Namun yang terjadi bukanlah perjanjian yang setara dan menguntungkan satu sama lain, setidaknya dari perjanjian ini dapat berkontribusi mengurangi tindak kemiskinan yang ada di Kongo, kenyataannya kemiskinan masih tinggi dengan 71% penduduk Kongo hidup dengan kurang dari US \$1, 25 per hari dan diklasifikasikan oleh UNDP sebagai tingkat kemiskinan terparah, dimana Human Development Index (HDI) Kongo masih menduduki peringkat 2 dari bawah (186 dari 187 negara) pada tahun 2016. Kongo tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan gagal mencapai salah satu Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2016 (UNDP, 2016).

Huayou Cobalt merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan bahan baterai lithium-ion dan olahan kobalt lainnya. Perusahaan ini memiliki slogan “Rooted in China, Making Friends All over the World” yang berarti “Berakar di Tiongkok, Berteman

di Seluruh Dunia” (Huayou Cobalt, 2020). Di sektor domestik, Kongo telah menjadi perusahaan dengan kontribusi yang cukup baik di berbagai tingkat dari kota hingga nasional dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Tiongkok. Secara internasional, perusahaan ini telah memperluas kegiatan bisnis transnasionalnya dengan fokus utama di negara- negara kaya akan sumber daya seperti negara- negara di Afrika, khususnya Kongo (Huayou Cobalt, 2021).

Dalam hubungannya dengan pemerintah Tiongkok, sebagai salah satu perusahaan swasta yang terlibat dengan perjanjian kerjasama barter antara Tiongkok dengan Kongo, Huayou Cobalt dibutuhkan dalam rangka strategi Tiongkok dalam mengurangi resiko kinerja yang ada pada tiap perusahaan Tiongkok yang ada di pertambangan dan juga keahlian dan pengetahuannya akan pengolahan mineral tambang (Global Witness, 2011). Dalam perjanjian tersebut Huayou Cobalt mendapatkan keuntungan sekitar 5% , jauh lebih sedikit daripada perusahaan milik negara Tiongkok maupun Kongo. Kongo mendapatkan keuntungan sekitar 32%, hal ini tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan konsorsium perusahaan Tiongkok (OECD, 2011). Selain itu menurut Amnesty Internasional, Huayou Cobalt merupakan tokoh utama dalam distribusi kobalt dari produk mentah hingga produk siap jadi sehingga keuntungan akan bermuara di pihak Tiongkok. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan Huayou Cobalt jauh lebih besar dibandingkan dengan Kongo.

Seluruh distribusi kobalt ke seluruh dunia diatur oleh CDM yang merupakan anak perusahaan Huayou Cobalt. Sebagai salah satu perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama Tiongkok dan Kongo, sudah dapat menggambarkan bahwa selain mengejar kepentingan pribadi perusahaan, Huayou Cobalt juga turun ambil bagian dari kebijakan dan ambisi dari pemerintahan Tiongkok dan dapat dikatakan bahwa Huayou Cobalt merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah Tiongkok berlandaskan pada kegiatan yang dilakukan Huayou Cobalt dalam mengamankan sumber daya kobalt yang ada di Kongo serta dengan tindakan tersebut ambisi Made in China 2025 dalam efisiensi bahan produksi demi menyangingi barat dapat terlaksana (Vandaele, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dengan bantuan teori neo-marxism dan teori ketergantungan. Kongo merupakan negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, namun kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan yang berarti sehingga menyebabkan Kongo mengalami stagnasi pada ekonomi dan tidak stabilnya kondisi politik

disana yang membuat Kongo mengalami keterbelakangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kongo membuka investasi asingnya dengan menciptakan kerjasama dengan Tiongkok sebagai langkah awal Kongo untuk keluar dari keterbelakangan tersebut, namun kerjasama ini yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar Kongo untuk keluar dari lingkaran kemiskinan justru malah semakin terjebak didalamnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kongo tidak dapat keluar dari keterbelakangan tersebut, yaitu:

Pertama, pinjaman dana investasi Tiongkok yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kongo. Pinjaman dana ini justru menciptakan pola ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok, pasalnya Kongo masih belum bisa secara mandiri melunasi hutang pinjaman tersebut dan berakhir pada dominasi Tiongkok dalam mengatur kebijakan untuk kepentingan mereka beserta perusahaan- perusahaan yang terlibat didalamnya (kaum kapitalis). Maka dengan adanya kebijakan tersebut, Kongo semakin tidak dapat meningkatkan infrastrukturnya serta melunasi hutang- hutangnya karena keuntungan tambang yang mereka dapatkan hanya digunakan untuk membayar hutang.

Adanya perusahaan transnasional yang mengambil alih pertambangan di Kongo. Huayou Cobalt sebagai perusahaan swasta asal Tiongkok memiliki peran dalam melanggengkan hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Kongo. Pasalnya dengan kemampuan Huayou Cobalt dalam mengolah kobalt membuat Tiongkok dapat menguasai proses distribusi kobalt yang ada di Kongo dari bahan mentah hingga barang siap jadi. Hal ini mencerminkan bahwa sebagai perusahaan swasta yang memiliki hak dalam perjanjian antara Tiongkok dengan Kongo, Huayou Cobalt memiliki peran dalam memaksimalkan keuntungan yang didapat Tiongkok karena dominasi jalur distribusi kobalt tersebut, sehingga keuntungan akan terus berada di pihak kaum kapitalis baik perusahaan maupun pemerintah Tiongkok. Serta dapat mengamankan pasokan bahan mentah demi efisiensi yang dilakukan Tiongkok untuk mengejar ambisi mereka dalam menyangingi barat.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa negara berkembang bukanlah negara yang tidak bisa maju, mereka telah berusaha untuk maju namun adanya faktor luar seperti dominasi negara maju, eksploitasi, investasi menyebabkan negara berkembang tidak dapat keluar dari keterbelakangan mereka. Kerjasama dengan negara yang lebih dominan bukan jaminan sebuah negara berkembang dapat keluar dari keterbelakangan mereka, sehingga perlu diketahui bahwa kerjasama akan berjalan dengan baik asalkan struktur internasional yang timpang tidak ada.

SARAN

Penelitian ini berfokus pada ketergantungan Kongo terhadap bantuan dana investasi yang diberikan oleh Tiongkok, dan bentuk ketimpangan yang terjadi di dalam perjanjian tersebut yang melibatkan salah satu konsorsium perusahaan transnasional yaitu Huayou Cobalt melalui perspektif *neo-marxism* dan diteruskan oleh teori ketergantungan oleh tokoh Andre Gunder Frank. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan Kongo dan Tiongkok melalui sudut pandang kapitalisme karena terdapat unsur ekonomi politik yang terjadi di dalam proyek kerjasama Kongo dan Tiongkok. Selain itu, diketahui bahwa bukan hanya Huayou Cobalt sebagai satu- satunya perusahaan transnasional yang terlibat di dalam proyek kerjasama Kongo dan Tiongkok. Berangkat dari hal tersebut, penelitian selanjutnya dapat menjelaskan motif di balik munculnya perusahaan transnasional Tiongkok di pertambangan Kongo, serta peran apa saja yang ada pada perusahaan- perusahaan yang terlibat dalam proyek kerjasama Kongo dan Tiongkok.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk mengembangkan studi Hubungan Internasional, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rumpun ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kaitannya dengan teori *neo-marxism* dan teori ketergantungan dalam menganalisis proyek kerjasama barter hak pertambangan dan pembangunan infrastruktur antara Kongo dan Tiongkok.

REFERENSI

- Anshan, L. (2007). China and Africa: policy and challenges. *China security*, 3(3), 69-93.
- Barboza, D. (2007). 'China seeks known brands to go global', The New York Times.
- Bennett, W. W., Teasdale, P. R., Welsh, D. T., Panther, J. G., & Jolley, D. F. (2012). Optimization of colorimetric DET technique for the in situ, two-dimensional measurement of iron (II) distributions in sediment porewaters. *Talanta*, 88, 490-495.
- Budimbwa, K. (2008). Decrypt d'invité: Le "sinisme" du contrat le plus leonine,". *Au Grand Beau et Riche Pays*.
- Clark, J. F. (2008). *The failure of democracy in the Republic of Congo*. Lynne Rienner Publishers.
- Dermont, G., Bergeron, M., Mercier, G., & Richer-Lafleche, M. (2008). Soil washing for metal removal: a review of physical/chemical technologies and field applications. *Journal of hazardous materials*, 152(1), 1-31.

- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1990). *Contending Theories Of International Relations: A Comprehensive Survey*. Harper & Row Publishers (New York). Halaman 10-11.
- Dugis, V. (2016). *Marxism and Structuralism*. Malang: Universitas Airlangga.
- Forsmoor, J., Anderson, K., Macleod, C. J., Wilkinson, M. E., & Brazier, R. (2018). Drone-based structure-from-motion photogrammetry captures grassland sward height variability. *Journal of Applied Ecology*, 55(6), 2587-2599.
- Global Times. (2021). DR Congo 'welcomes' Chinese mining firms, official says after reported scrutiny on deals. <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232699.shtml>
- Gov. (2014). China-Africa Economic and Trade Cooperation. http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986536.htm. Diakses pada 20 Oktober 2022
- Gruben, W., & Liljedahl, J. B. (1962). Some reliability concepts and survey results applicable to farm equipment. *American Society of Agricultural Engineers Paper*, (62-638).
- Hentschel, M. (2003). *Artisanal and Small- Scale Mining: Challenges and Opportunities*. World Business Council for Sustainable Development. Diakses pada 20 Oktober 2022
- Hon, T., Jansson, J., Shelton, G., Liu, H., Burke, C., & Kiala, C. (2010). *Evaluating Tiongkok's FOCAC Commitments To Africa And Mapping The Way Ahead*. Diakses 28 Maret 2022.
- Huayou Cobalt. (2019). *Labor Practices and Human Rights*. Diakses pada 13 April 2022 (<http://en.huayou.com/social1.html?introId=53>).
- Huayou Cobalt. (2020). *The Website of Huayou Cobalt*. <https://en.huayou.com/>. Diakses pada 20 Oktober 2022
- Huayou Cobalt. (2021). *Create customer value, lead industrial development*. <https://en.huayou.com/honor.html?productCateId=56>. Diakses pada 20 Oktober 2022
- Lloydsbanktrade. (2022). *Foreign direct investment (FDI) in the Democratic Republic of Congo*. <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/investment#:~:text=According%20to%20UNCTAD's%202021%20World,by%20the%20Covid%2D19%20pandemic>. Diakses pada 13 Oktober 2022

- Jansson, J., Burke, C., & Jiang, W. (2009). Chinese Companies In The Extractive Industries Of Gabon & The DRC: Perceptions Of Transparency. *Centre for Chinese Studies–University of Stellenbosch/EITI/Revenue Watch*.
- Kafarhire, J. B. B. (2019). China's investment in the Democratic Republic of Congo: The impact of the 2007 Sino-Congolese agreement in a postwar period.
- Kane, T. M., & Serewicz, L. W. (2001). China's hunger: the consequences of a rising demand for food and energy. *The US Army War College Quarterly: Parameters*, 31(3), 7.
- Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*
- Landry, D. (2018). The Risks And Rewards Of Resource-For-Infrastructure Deals: Lessons From The Congo's Sicomines Agreement. *Resources Policy*, 58, 165-174.
- Marysse, S., & Geenen, S. (2011). Triangular Arm Wrestling: Analysis and Revision of the Sino-Congolese Agreements. In *Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa* (pp. 237-251). Palgrave Macmillan, London.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:
- Nhantumbo, I., Njumboket, I., Nkanda, J. M., Bolin, A., & Mayers, J. (2019). Chinese investment in DRC: a view from the forest. *IIED Briefing Paper-International Institute for Environment and Development*, (17640).
- Nyabiage, Jevans. (2021). Cobalt Blues: Congolese Miners, and Tiongkok's Role in Improving Their Conditions. Diakses pada 24 April 2022. <https://www.drcminingweek.com/article/cobalt-blues-congolese-miners-and-Tiongkok-s-role-improving-their-condition>
- O'Brien, P. J. (2012). A Critique Of Latin American Theories Of Dependency. In *Beyond The Sociology Of Development* (pp. 21-41). Routledge.
- Ross, A. (2017). "Congo orders China joint venture to stop exporting raw metals". *Wayback Machine. Reuters*
- Sampson, M. D. (2021). The downstream implications of the EU-China investment agreement: lessons from trade. *Balsillie Papers*, 3(5).
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2009). Introduction to International Relations: Perspectives and Themes-also produced in Greek and Romanian.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,

Uren, David. (2021). How Tiongkok wrested control of the Congo's critical minerals. Diakses pada 23 April 2022. <https://www.aspistrategist.org.au/how-Tiongkok-wrested-control-of-the-congos-critical-minerals/>

Vandaele. (2008). China outdoes Europeans in Congo. Inter Press Service. Diakses pada 20 Oktober 2022

Viotti dan Kauppi. (2012). *International Relations Theory Fifth Edition*. New York: Pearson Education.

Wang, W. (2021). Opportunities and challenges facing China's economy.

Wild, D. S., Shahmoon, E., Yelin, S. F., & Lukin, M. D. (2018). Quantum nonlinear optics in atomically thin materials. *Physical review letters*, *121*(12), 123606.

Yi, C., Rostron, P., Vahdati, N., Gunister, E., & Alfantazi, A. (2018). Curing kinetics and mechanical properties of epoxy based coatings: the influence of added solvent. *Progress in Organic Coatings*, *124*, 165-174.